

DAMPAK KEBIJAKAN LIBERALISASI PERDAGANGAN TERHADAP SURPLUS PRODUSEN DAN KONSUMEN PADA INDUSTRI PERSUSUAN DI JAWA BARAT

Hasni Arief* dan Cecep Firmansyah

Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran

**Corresponding Author Email:* hasni.arief@unpad.ac.id

Abstrak. Seiring perkembangan aktivitas perekonomian dunia, arah kebijakan makroekonomi Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya mengalami perubahan, yakni mengarah kepada kebijakan liberalisasi perdagangan. Untuk industri persusuan, pemerintah telah melakukan deregulasi dan liberalisasi aktivitas ekonomi sejak Tahun 1998, yang ditandai dengan pencabutan kebijakan rasio impor. Adanya kebijakan liberalisasi perdagangan di dalam industri persusuan merupakan suatu langkah yang sangat ekstrim dilakukan oleh pemerintah. Kondisi peternakan sapi perah yang belum sepenuhnya baik (skala usaha relatif kecil sehingga manajemen usahaternaknya masih tradisional), dengan posisi IPS yang relatif kuat dalam pemasaran susu segar dalam negeri menjadi sumber kekhawatiran dalam menghadapi kebijakan liberalisasi perdagangan. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji distribusi kesejahteraan antara peternak sapi perah rakyat selaku produsen susu segar dan IPS selaku konsumen susu segar sebagai tujuan akhir dari kebijakan liberalisasi perdagangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penggunaan data sekunder (time series) 1998 – 2007. Analisis data menggunakan analisis surplus produsen dan konsumen guna menunjukkan distribusi kesejahteraan antara produsen (peternak sapi perah rakyat) dan konsumen (Industri Pengolah Susu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan liberalisasi perdagangan, surplus produsen (peternak sapi perah rakyat) lebih besar dibanding pada kondisi adanya proteksi. Meskipun demikian, kondisi tersebut belum menggambarkan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya.

Kata Kunci: kebijakan liberalisasi perdagangan, kebijakan rasio impor, industri persusuan, industri pengolah susu, surplus produsen, konsumen